

BAB III

DINAMIKA ISLAMOPHOBIA DI INGGRIS

Bab ini mejabarkan apa itu Islamophobia yang diikuti dengan perkembangan Islamophobia di Inggris serta tindakan apa saja yang diambil berkaitan dengan Islamophobia yang terjadi. Kemudian, dipaparkan juga mengenai dimensi-dimensi Islamophobia serta kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap Islamophobia di Inggris.

A. Konsep Islamophobia

Secara pendek, Islamophobia merupakan tindakan rasisme terhadap kelompok Muslim. Secara lebih detil, menurut *think tank* Runnymede, Islamophobia adalah semua pembedaan, pembatasan, pelarangan, atau pengecualian terhadap Muslim (atau yang dianggap sebagai Muslim) yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi pengakuan, kenyamanan, atau kegiatan yang setara dalam hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang lain dalam kehidupan publik (Alshammari, 2013).

Menurut Bayrakli:

“Ketika berbicara tentang Islamophobia, kita berbicara tentang rasisme anti Muslim. Seperti studi mengenai anti Semitisme, komponen etimologis suatu kata tidak harus menunjukkan arti keseluruhan, atau bagaimana kata tersebut digunakan. Seperti dalam studi Islamophobia. ‘Islamophobia’ telah menjadi istilah umum yang digunakan baik dalam lingkup akademis

maupun publik. Kritik terhadap Muslim atau agama Islam bukan selalu berbentuk Islamophobia. Islamophobia adalah tentang suatu kelompok dominan yang bertujuan merebut, menegakkan, dan memperluas kekuasaan dengan cara membentuk kambing hitam—baik secara nyata maupun buatan—dan menjauhkan kambing hitam ini dari sumberdaya dan hak dari kelompok ini. Islamophobia berjalan dengan membentuk identitas Muslim yang statis, yang dikaitkan dengan istilah-istilah negatif dan dilekatkan ke semua Muslim. Namun, dalam waktu yang bersamaan, citra Islamophobia berubah sesuai konteks...” (Bayrakli & Hafez, 2016, p. 8).

Tindakan Islamophobia yang tidak adil ini menyumbang diskriminasi besar bagi Muslim di seluruh dunia. Hal ini menjadi dasar pemisahan Muslim dari arena politik dan kelas sosial di masyarakat. Fenomena Islamophobia dicirikan dengan adanya asumsi tertentu mengenai kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan Muslim.

Istilah Islamophobia awalnya muncul di Prancis pada tahun 1920-an. Awalnya istilah ini muncul dalam studi Kolonial Barat mengenai Timur (Orientalisme) (Sayyid, 2014). Istilah Islamophobia yang sekarang ramai digunakan muncul pada 1997 setelah Runnymede mempopulerkan istilah tersebut sebagai akibat meningkatnya tindakan rasisme terhadap Muslim di Inggris. Islamophobia dipandang sebagai tindakan rasisme yang tidak biasa; dimana rasisme umumnya mendiskriminasi berdasar etnis, namun Islamophobia mendiskriminasi Muslim yang faktanya dapat berasal dari etnis manapun (Hussain, 2017). Istilah Islamophobia kemudian semakin

masif digunakan untuk menyebut fenomena diskriminasi terhadap Muslim pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, dan menjadi kajian “*Clash of Civilization*” Fukuyama dan Huntington pada 2009 (Alshammari, 2013, p. 177).

Meskipun begitu, ada pula kelompok yang menolak istilah ‘Islamophobia’ dengan beberapa alasan. Pertama, mereka menolak adanya suatu tindakan diskriminasi terhadap Muslim. Menurut mereka, tindakan diskriminasi ini murni adalah rasisme dan diskriminasi biasa, dan tidak ada sangkut pautnya apakah korban merupakan Muslim atau bukan. Kedua, istilah ini seolah menghalangi adanya kritik atau debat mengenai Muslim dan Islam; istilah ini dimunculkan agar Muslim dan Islam terhindar dari diskusi dan debat politik yang kadang mencederai Muslim karena politikus tidak akan mengkritik Islam agar tidak disebut *Islamophobic*. Ketiga, Islamophobia bukan hal yang mengherankan karena merupakan respons sah terhadap ancaman yang muncul dari tindakan sekelompok Muslim radikal (Sayyid, 2014, p. 13).

Tapi tentu saja, menurut Sajid (2005), istilah Islamophobia tetap diperlukan sebagai alat analisa karena *prejudice* anti Muslim sudah sangat berkembang sangat cepat dan masif sehingga perlu istilah baru, agar kemudian dapat dilawan (Alshammari, 2013, p. 178). Menurut *Stephen Israeli Journal*, Islamophobia memiliki ciri berikut:

1. Ada serangan terhadap agama Islam.

2. Menolak dan mengecam kepercayaan dan praktek Islam dan melabeli muslim sebagai ekstremis.
3. Memaksa Muslim untuk setuju terhadap pendapat dan tuntutan dari kaum agama lain.
4. Minoritas Muslim banyak tidak diakui oleh kaum agama lain.
5. Kekerasan terhadap Muslim dianggap sebagai hal wajar.
6. Komunitas Muslim dianggap kejam, mendukung terorisme, dan penyebab konflik di masyarakat.

B. Perkembangan Islamophobia di Inggris

1. Diskriminasi Etnik-Agama

Pada dekade awal pemukiman Muslim pasca-perang di Inggris, diskriminasi cenderung mengambil bentuk etnis dan ras. Bersama dengan kelompok etnis minoritas lainnya, Muslim, terutama yang berasal dari Asia Selatan, mengalami diskriminasi dalam lingkungan rumah, pendidikan, pekerjaan, layanan sosial dan kesejahteraan, serta media dan kehidupan publik. Sekarang ada bukti bahwa umat Islam juga menjadi sasaran diskriminasi agama yang lebih spesifik, yang telah mengambil berbagai bentuk, sifat, tingkat keseriusan, dan frekuensi diskriminasi ini diidentifikasi oleh laporan Kantor Pusat Diskriminasi Agama di Inggris dan Wales (2001), yang menyoroti pendidikan, pekerjaan, dan media sebagai bidang yang paling mungkin terjadi (Weller, 2011).

Beberapa masalah penting adalah ketersediaan makanan halal; cuti untuk festival keagamaan; penolakan untuk memberikan waktu istirahat untuk shalat; fasilitas beribadah yang kurang atau tidak memadai; dan masalah pakaian dan bahasa dalam berbagai pengaturan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, penjara, lembaga swasta dan publik, dan organisasi (Weller, 2011). Laporan tersebut menyoroti perlakuan yang tidak adil terhadap umat Islam di lingkungan rumah, dan mencatat kesempatan ketika izin perencanaan ditolak untuk masjid, sekolah, dan situs pemakaman. Dalam pekerjaan, diskriminasi diidentifikasi atas aturan berpakaian, kurangnya rasa hormat dan ketidaktahuan terhadap adat istiadat agama, dan dalam praktik perekrutan dan seleksi. Pemakaian jilbab terbukti bermasalah di sekolah dan beberapa tempat kerja.

Bukti yang cukup banyak terkumpul selama tahun 1990-an untuk mengungkap pola pengucilan Muslim dari kehidupan publik (Ansari, 2002). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengubah keadaan ini. Pembentukan politik telah mengakui kehadiran Muslim dengan pesta Idul Fitri yang diberikan untuk Muslim Inggris di House of Commons dan di Downing Street, tetapi, sepanjang tahun 1990-an, pengaruh Muslim di tingkat pemerintahan nasional dan di lembaga-lembaga publik yang terkenal, tetap minim. Di tingkat individu, umat Islam juga mudah dikucilkan. Namun, selama tahun 1990-an, meskipun ada banyak perlawanan, minoritas kecil Muslim di Inggris

membuat kemajuan yang menggembirakan, meskipun lambat dan merata, dalam berbagai lapisan masyarakat (Ansari, 2002). Hal ini sebagian karena meningkatnya rasa empati terhadap mereka dan sebagai pengakuan atas kontribusi mereka kepada masyarakat Inggris. Beberapa Muslim dianugerahi penghargaan. Sejumlah lembaga yang semakin luas mengakui manfaat mengatasi diskriminasi dan pengucilan yang dihadapi umat Islam, baik dalam pemberian layanan maupun dalam kehidupan organisasi.

Namun demikian, situasi keseluruhan Muslim Inggris tetap suram: Islamofobia meluas, dimanifestasikan dalam pandangan prasangka, kebijakan dan praktik diskriminatif, pengucilan sosial dan berbagai bentuk kekerasan terus berlanjut. Banyak Muslim Inggris merasakan campuran dendam, kemarahan dan putus asa, dan tidak mengherankan bahwa beberapa dari mereka tetap terasing dari arus utama masyarakat Inggris. Banyak keadaan yang menyebabkan ketidakpuasan sepanjang tahun 1960-an yang pada dasarnya tetap tidak berubah (Ansari, 2002).

2. Islamophobia di Inggris Masa Kini

Ada sekitar 1,6 sampai 2,7 juta Muslim di Inggris dan hampir separuhnya penduduk asli/lahir di Inggris. Muslim di Inggris mencakup 4,8% total populasi. Meskipun digadang-gadang sebagai negara yang menjunjung multikulturalisme, pada survei yang

dilakukan pada 2011, 75% penduduk Inggris memandang Islam sebagai agama yang penuh kekerasan. Lebih lanjut, ketika pada 2013 dua orang Muslim membunuh tentara Inggris di London, satu dari empat warga Inggris yang disurvei memandang bahwa nilai-nilai Islam tidak cocok dengan nilai-nilai yang dianut Inggris. Pada 2014, 35% penduduk Inggris memandang Islam sebagai ancaman, meskipun kemudian pada 2015 72% memandang Islam secara lebih baik (Engy, 2017).

Di Inggris, persepsi masyarakat terhadap sesuatu yang asing dan minoritas dipengaruhi oleh peliputan media terhadap hal tersebut. Sehingga, prestasi maupun penampilan Muslim yang positif di media dapat meningkatkan pandangan warga Inggris terhadap Islam. Misalnya, anggota parlemen Sadiq Khan yang berhasil menjadi walikota London pada 2016 dan Nadiya Hussain yang menjuarai ajang pencarian bakat memasak di Inggris. Hal ini kemudian yang mempengaruhi 72% penduduk menjadi memandang Islam secara positif pada 2015 (Engy, 2017).

Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa krisis pengungsi baru-baru ini jelas mempengaruhi pandangan warga Inggris terhadap Islam. Pada survei 2016, 28% memandang Muslim secara negatif; 52% percaya bahwa kehadiran pengungsi akan meningkatkan aksi terorisme; 46% khawatir pengungsi akan mengambil pekerjaan dan santunan sosial dari pemerintah; dan 54% percaya bahwa Muslim

sendiri yang menolak untuk berintegrasi dengan warga Inggris (Engy, 2017).

Perilaku kebencian terhadap Islam di Inggris meningkat pada 2013 pasca pembunuhan seorang tentara Inggris oleh dua orang muslim. Di tahun itu pula, tercatat ada 193 perilaku kebencian terhadap Muslim, termasuk satu pembunuhan dan 10 serangan ke masjid. Pada 2014-2015, ada lebih dari 800 kejahatan terhadap Muslim di London, meningkat 70% dari tahun sebelumnya. Hingga November 2015 ketika terjadi Serangan Paris, tercatat ada 878 serangan yang menargetkan warga Muslim di London. Menurut Perkumpulan Kepala Polisi Inggris, 50-60% dari total perilaku kebencian ditujukan secara khusus kepada Muslim (Engy, 2017).

Perempuan menjadi pihak yang terdampak keras dari perilaku kebencian ini. Mereka mendapat perlakuan kebencian seperti ancaman verbal untuk “keluar dari Inggris” maupun fisik. Secara umum warga Inggris akan berbicara dengan nada merendahkan kepada perempuan yang memakai jilbab.

Aksi dan ancaman kekerasan terhadap Muslim meningkat sekitar 57% menjelang Brexit (Engy, 2017). Hal ini, menurut PBB, karena kegagalan elit dalam mengecam aksi-aksi tersebut. Alih-alih, elit politik yang mendukung Brexit malah banyak menyampaikan pidato-pidato yang secara langsung maupun tersirat mendukung aksi dan prejudis warga Inggris terhadap Muslim.

Pada 2015, massa secara terkoordinasi dan teratur oleh aktivis kanan melancarkan berbagai aksi protes menolak pembangunan berbagai masjid serta menyatakan kekecewaan terhadap masjid-masjid yang sudah dibangun. Hal ini diperparah oleh kebijakan PM Cameron waktu itu yang akan menutup masjid-masjid sebagai upaya pencegahan terorisme (Ramadan, 2017).

Muslim di Inggris juga berjuang melawan tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Tingkat pengangguran Muslim merupakan yang tertinggi dibanding kelompok agama lain. Bagi perempuan Muslim, keadaan menjadi lebih berat karena selain mengalami diskriminasi agama, etnis (karena kebanyakan Muslim berasal dari keturunan imigran), mereka juga mengalami diskriminasi gender. Perlu digarisbawahi pula bahwa banyak Muslim yang bekerja pada sektor *low skill labor market* (seperti supir taksi, pelayan, satpam, buruh pabrik, dan sebagainya) (The Runnymede Trust, n.d.). Hal ini akan menghambat pertumbuhan dan integrasi sosial ekonomi.

Masalah jilbab dan niqab masih menjadi isu diskriminasi di Inggris. Meskipun sejak 1983 pemerintah membolehkan kerudung di sekolah, namun pada 2006 pemerintah menolak membolehkan jilbab (yang terurai lebih panjang dan lebih menutupi kepala) (Engy, 2017).

3. Tindakan yang Diambil Berkaitan dengan Islamophobia di Inggris

Polisi dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengamankan komunitas-komunitas muslim dari serangan kebencian warga terhadap Muslim sekaligus mengawasi tindakan-tindakan yang disinyalir dapat menuju terorisme oleh muslim itu sendiri. Selain meningkatkan patroli di sekitar masjid dan Islamic Center, polisi dapat berkomunikasi dengan pemimpin lokal Muslim. Hal ini pernah dilaksanakan di Birmingham dan London serta didokumentasikan oleh *European Monitoring Center on Racism and Xenophobia*.

Program lain seperti *Islamophobia – Don't Suffer in Silence* merupakan skema pelaporan tindakan kriminal yang digagas oleh *The Association of Chief Police Officers (ACPO)*, *National Community Tension Team and the Muslim Safety Forum* meliputi bagian-bagian London dan sekitarnya. Selain sebagai skema pelaporan, program ini juga menyebarkan pamflet dan buku-buku edukasi ke masjid dan titik kumpul masyarakat serta kantor polisi agar masyarakat lebih mudah mengakses edukasi tentang Islam yang benar dan mengurangi Islamophobia (Mrda, 2014). Program ini bertujuan untuk memastikan komunitas Muslim bahwa polisi benar-benar memiliki keseriusan untuk memberantas Islamophobia.

Ada berbagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang dapat mewadahi aspirasi dan mendukung gerakan anti Islamophobia di Inggris. Salah satu NGO paling akomodatif adalah *Muslim Council of Britain* (MCB) yang didirikan pada November 1997. NGO ini

memiliki jaringan dengan 250 NGO lain dan sangat aktif setelah serangan 9/11. MCB sering berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan komunitas Muslim, serta Perdana Menteri. MCB juga mendorong agar Muslim lebih aktif dalam pemilu agar aspirasi mereka di parlemen dapat lebih dilindungi oleh tokoh-tokoh muslim yang terpilih. Setelah serangan 9/11, MCB mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan ke publik bahwa serangan ini bukan mewakili Islam dan Muslim pun juga terkejut dan marah atas kejadian ini (MCB, 2018).

Islamic Human Rights Commission (IHRC) dibentuk pada 1997. IHRC menerbitkan informasi dan kampanye yang menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan maraknya perilaku kebencian atas dasar Islamophobia di Inggris. IHRC bekerja sama dengan orangtua dan guru untuk melawan Islamophobia di sekolah (IHRC, 2018). Selain itu, ada juga *Forum against Islamophobia & Racism* (FAIR) dibentuk pada 2001 sebagai organisasi amal yang bertujuan membangun Inggris yang aman, adil, dan toleran tanpa Islamophobia dan rasisme. Perwakilan FAIR mengundang akademisi, aktivis, dan anggota parlemen dan kandidat baik Muslim maupun non-Muslim untuk berdiskusi dan berdebat tentang meningkatnya Islamophobia di masyarakat Inggris. FAIR juga menerbitkan *Daily News Digest*, media jurnalisme yang berisi info dan berita tentang Muslim (FAIR , n.d.).

Salah satunya lagi, *The Islamic Foundation*, didirikan pada 1973 di Leicester dan menjadi salah satu institusi akademik Muslim pelopor di dunia. Organisasi ini mendorong dialog dengan kebudayaan, ideologi, dan agama lain karena sadar akan kebutuhan untuk hidup berdampingan antara Muslim dan non-Muslim. Sejak peristiwa 9/11, *Islamic Foundation* telah mulai bekerja dengan universitas-universitas untuk mendukung studi mengenai Islam dan mendukung upaya dialog antar agama, riset mengenai identitas Muslim di Inggris, dan sejarah Muslim di Eropa. Institusi ini juga memberi latihan kesadaran keberagaman bagi non-Muslim profesional seperti polisi (The Islamic Foundation, 2010). Selain organisasi di atas, ada juga kegiatan Islam *Awareness Week* yang diselenggarakan oleh *Islamic Society of Britain* (ISB) sejak 1994. Pasca peristiwa 9/11, kegiatan ini berisi diskusi, presentasi, dan donasi yang diselenggarakan di seluruh Inggris, dilaksanakan di Palemen Inggris dengan kontribusi dari anggota parlemen baik Muslim maupun non-Muslim (Mrda, 2014).

Meskipun begitu, upaya terkuat yang perlu dilakukan adalah dengan menguatkan instrumen politik yaitu undang-undang. Di Inggris, sudah ada UU mengenai rasisme dan kebencian antar agama, namun penerapan di masyarakat masih minim. Masih banyak perilaku di masyarakat yang lepas dari jerat hukum. Terlebih lagi, pasca Brexit, politik Inggris cenderung mengarah ke kanan dimana isu anti imigran dan anti pengungsi semakin menguat. Hal ini didukung pula oleh para

elit politik yang seolah-olah mengizinkan perilaku-perilaku kebencian berbasis agama tersebut. Padahal, jika ditilik lebih jauh, justru Muslim-lah yang banyak mengalami diskriminasi dan penderitaan di Inggris baik dari sisi sosial, hukum, ekonomi, maupun pendidikan. Sehingga, sejatinya pandangan Islamophobia (takut terhadap Islam) tidaklah tepat karena Muslim di Inggris secara teknis lebih lemah daripada warga Inggris lainnya. Hal ini perlu ditegaskan dan perlu diedukasikan ke masyarakat agar tidak ada lagi perilaku kebencian akibat ketidaktahuan dan kesalahpahaman yang menjadi Islamophobia tersebut.

C. Dimensi Islamophobia di Inggris

1. Islamophobia dalam Pendidikan dan Pekerjaan

Bentuk Islamophobia dalam pendidikan di Inggris dapat berasal dari kurikulum; misalnya, pengajaran mengenai konflik Israel-Palestina yang sangat memihak. Selain itu, dalam pergaulan antar murid, Islamophobia juga kerap terjadi seperti adanya serangan, coretan, dan vandalisme di area sekolah komunitas Muslim. Pernah dilaporkan adanya ancaman berupa kepala babi yang diletakkan di luar Markazul Aloom School di Blackburn (Press Association, 2015). Kasus lain seperti penganiayaan kepada perempuan berhijab di King's College London yang disaksikan oleh petugas keamanan (Ullah, 2017) dan penyiraman *bleach* ke mata anak laki-laki berumur 11

tahun di Great Barr (Mann, 2016) juga merupakan contoh bagaimana sesama murid melakukan tindakan kepada Muslim akibat maraknya Islamophobia. Tindakan yang paling umum terjadi adalah meneriaki murid Muslim untuk ‘pulang’ ke asal mereka.

Pada Januari 2016, sebuah situs dirilis oleh Departemen Pendidikan Inggris menyatakan bahwa situs tersebut dapat memberi pendidikan bagi orangtua, guru, dan sekolah untuk melindungi anak-anak dari bahaya radikalisme. Sayangnya, meskipun memasukkan konten mengenai radikalisme dalam Islam namun Departemen Pendidikan bahkan tidak sama sekali berkonsultasi dengan komunitas Muslim dalam penyusunan situs tersebut (Corderoy & Bryant, 2016).

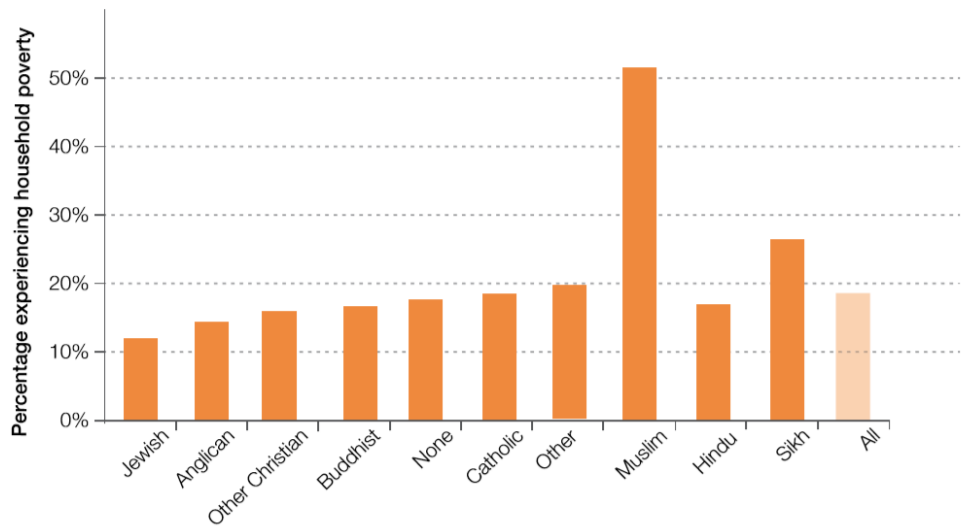
Masalah yang kerap terjadi salah satunya juga mengenai isu hijab/cadar/niqab. Lembaga pengawas pendidikan, *Schools Inspectorate Ofsted*, menyatakan akan menurunkan peringkat sekolah yang membolehkan siswinya memakai niqab (Shackle, 2016). Salah satu sekolah lokal di Leeds melarang siswinya memakai hijab dengan alasan keamanan. Pada 2006 pemerintah menolak membolehkan hijab panjang yang terurai dan menutupi seluruh rambut. Pada 2007, Departemen Anak, Sekolah, dan Keluarga menerbitkan aturan bahwa sekolah harus memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan religius siswa dan guru, namun niqab tetap dilarang (Engy, 2017).

Akibat Islamophobia di Inggris, menurut Hussain (2008), Muslim di Inggris lebih cenderung untuk putus sekolah pada usia 16

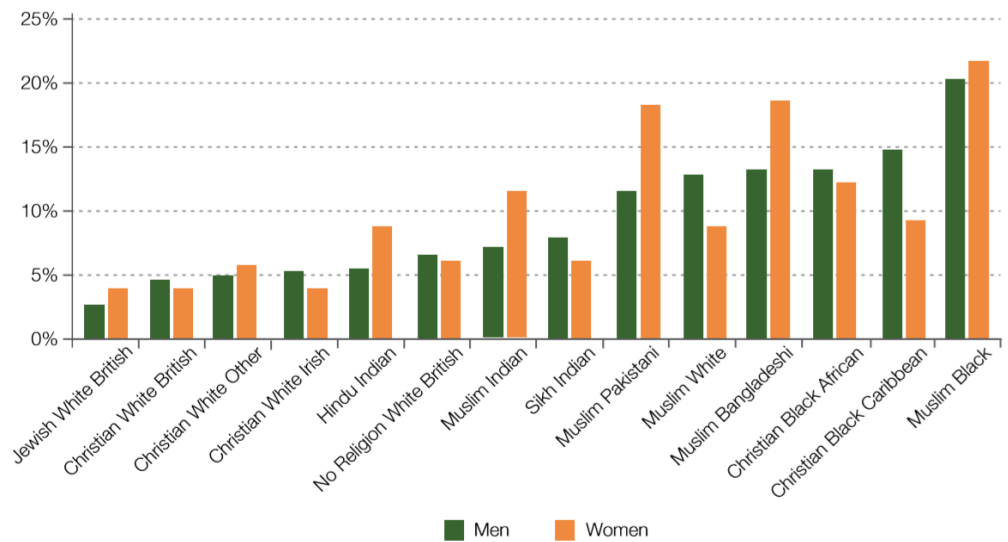
tahun tanpa keterampilan yang memadai. 22% dari Muslim usia 16-24 dilaporkan tidak memiliki kualifikasi. Meskipun begitu, sebaliknya, rata-rata Muslim yang menyelesaikan perguruan tinggi lebih besar daripada rata-rata nasional; 52% dibanding 41% rata-rata nasional (Hussain, 2017, p. 21). Meskipun begitu, menurut *Social Mobility Commission* (2017), jumlah ini tidak serta-merta menjanjikan hasil tingkat pengangguran yang rendah di kalangan Muslim Inggris.

Terjadi kesenjangan antara kelompok Muslim dan kelompok agama lain di Inggris dalam hal pekerjaan. Rata-rata penduduk Inggris 16-24 tahun yang bekerja di sektor formal adalah 51%, namun di kalangan kelompok Muslim hanya 29%. Di sektor informal, 52% pria Muslim tidak aktif secara ekonomi (dari 36% penduduk pria Inggris) dan 60% wanita Muslim tidak aktif secara ekonomi (dari 39% penduduk wanita Inggris) (Engy, 2017).

Akibatnya, Muslim di Inggris adalah kelompok yang menderita kemiskinan. Meskipun rata-rata 'kemiskinan rumah tangga' di Inggris hanya 18%, namun 50% dari Muslim Inggris mengalami masalah ini. Kemiskinan nasional di Inggris secara umum 5,4%, namun di kalangan Muslim Inggris terdapat 12,8% warga miskin. 71% perempuan Muslim juga lebih rentan menjadi pengangguran ketimbang perempuan Kristen dengan kemampuan dan pendidikan yang setara (Engy, 2017).



Gambar 3.1. Grafik kemiskinan di Inggris berdasar kelompok agama. Sumber: Heath, A. & Mustafa, A. 2017. “Poverty and labour market”. Islamophobia: Still a Challenge for Us All. London: Runnymede, hal. 25. (Heath & Mustafa, 2017)



Gambar 3.2. Grafik pengangguran di Inggris berdasar latar belakang etnik-agama. Sumber: Heath, A. & Mustafa, A. 2017. “Poverty and labour market”. Islamophobia: Still a Challenge for Us All. London: Runnymede, hal. 26. (Heath & Mustafa, 2017)

2. Islamophobia dalam Politik dan Hukum

Dalam politik, Sayyid (2014: 20) memaparkan beberapa ciri bahwa Islamophobia telah mengkristal/mengendap dalam pemerintahan dan masyarakat, antara lain:

- 2.1. Ada upaya eksplisit untuk “de-Islamisasi” baik secara pernyataan maupun perbuatan. Upaya ini diinstitutionalisasi ke dalam ranah pemerintahan dan *civil society*. Hal ini seperti yang terjadi di Spanyol pasca keruntuhan Granada pada abad ke-15. Islamophobia adalah kebijakan resmi.
- 2.2. Kebijakan dan keputusan negara bersifat *Islamophobic*, meskipun secara resmi negara tersebut tidak mengakuinya.
- 2.3. Ada banyak gerakan dan organisasi masyarakat yang menuntut tindakan yang *Islamophobic*. Kelompok-kelompok ini sifatnya bukan lagi kelompok marjinal dengan sedikit pengikut namun sudah menjadi gerakan *mainstream*.
- 2.4. Ada tuntutan dari masyarakat untuk mengambil tindakan yang *Islamophobic*, meskipun ada yang menolaknya; isu tentang Islamophobia selalu diperdebatkan.

Dengan ini, dapat diamati bahwa pemerintahan di Inggris sudah terindikasi bersifat *Islamophobic*. Hal ini terutama karena perilaku elitnya yang mendukung masyarakat yang mengalami Islamophobia. Misalnya, pada pemilihan Walikota London, Zac Goldsmith dituduh menggunakan isu Islamophobia untuk menyerang lawannya Sadiq

Khan yang beragama Islam. Goldsmith menuduh Khan mendukung dan didukung oleh kelompok ekstremis (Mortimer, 2016). Tuduhan ini juga digulirkan dalam Parlemen oleh Perdana Menteri dan di Kementerian. Hasilnya, 1 dari 3 pemilih London menyatakan dalam survei tidak akan memilih Muslim sebagai walikota (Boyle & Baines, 2016).

Islamophobia juga memainkan peran besar dalam keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Pada waktu kampanye EU Referendum (untuk status keluar/tetap nya Inggris di Uni Eropa), muncul poster bernada *Islamophobic* dan rasisme terhadap Turki. Poster tersebut bertuliskan sebagai berikut:

“Karena tingkat kelahiran bayi di Turki tinggi, kita dapat menduga sekitar satu juta populasi Inggris akan bertambah dari Turki selama delapan tahun. Hal ini tidak hanya meningkatkan beban pelayanan publik Inggris, tapi juga memunculkan masalah keamanan. Kriminalitas di Turki jauh lebih tinggi ketimbang di Inggris. Kepemilikan senjata api juga lebih menyebar. Karena kebijakan *free movement* Uni Eropa, pemerintah tidak akan mampu menolak kriminal dari Turki masuk ke Inggris” (Boffy & Helm, 2016).

Hal ini diperparah dengan pernyataan PM David Cameron yang menyatakan bahwa wanita Muslim ‘pada dasarnya pasrah’ dan kekurangan kemampuan berbahasa Inggris, sehingga tidak mampu mencegah anak-anaknya dari radikalisasi (Merali, 2016, p. 594). Pasca

pengunduran diri PM Cameron akibat Brexit, Theresa May yang menggantikannya dianggap akan lebih mendukung Islamophobia. Berbagai organisasi masyarakat mengulas sejarah May sewaktu menjadi Sekretaris Dalam Negeri yang menerbitkan kebijakan anti terorisme yang cenderung menarget Muslim (Merali, 2016, p. 596).

Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Ekstremisme juga mendorong adanya intervensi pemerintah terhadap “pengaturan pendidikan tidak terregulasi” untuk menangkal radikalisme (Merali, 2016, p. 598). Hal ini akan meningkatkan pengawasan sektor pendidikan agama Islam informal bagi anak-anak yang dilaksanakan setelah sekolah formal. Padahal, lembaga ini belum jelas terbukti dapat melahirkan kelompok ekstremis. Kunjungan UN Special Rapporteur on the Freedom of Assembly ke Inggris juga menyatakan bahwa kebijakan anti-teror di Inggris tidak produktif, mencederai demokrasi, dan melakukan viktimisasi terhadap komunitas Muslim (IHRC, 2016).

Pada 2010, 250 warga Inggris mengajukan petisi menolak pembangunan masjid di Inggris yang direncanakan akan yang terbesar di Eropa (Engy, 2017). Banyak gerakan massa yang terorganisir dan didukung kelompok kanan berhasil melancarkan aksi protes dan membatalkan pembangunan masjid dan menyampaikan kekecewaan terhadap masjid yang sudah dibangun. Beberapa masjid juga ditutup oleh pemerintah dengan alasan pencegahan terorisme.

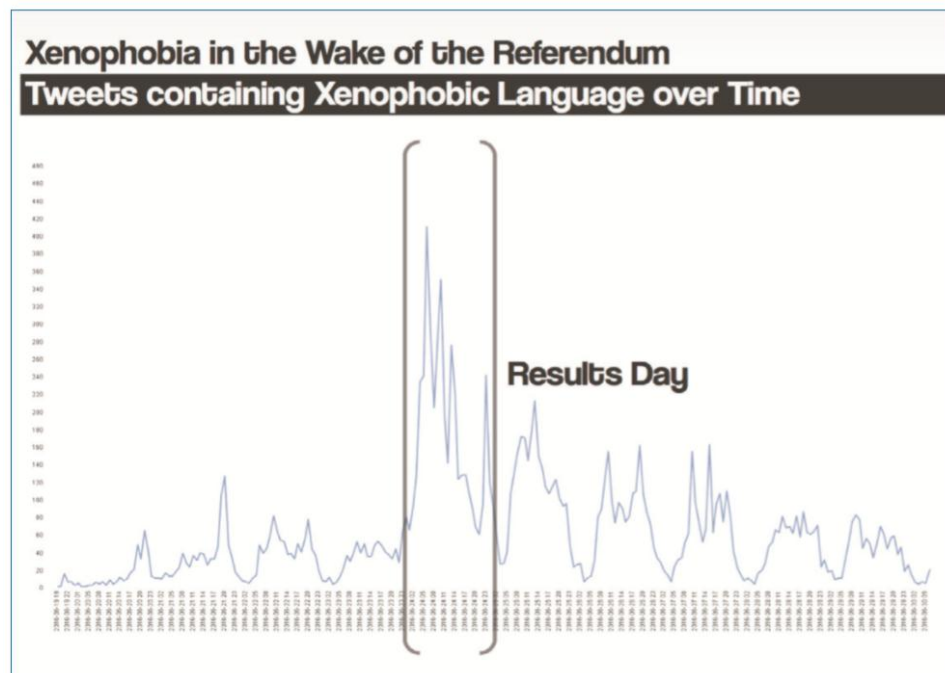
3. Islamophobia di Media

Survei oleh *City University* pada 2015 menemukan bahwa kelompok Muslim sangat sedikit yang terlibat dalam profesi media. Hanya 0,4% jurnalis mengaku Muslim atau Hindu, 31,6% Kristen, dan 61,1% mengaku “tidak beragama” (Safdar, 2016). Kurangnya keterwakilan Muslim dalam jurnalisme ini membuat banyak berita yang muncul di media *mainstream* cenderung bersifat *Islamophobic* pula. Banyak opini yang diliput media kemudian mempromosikan narasi *Islamophobic*, misalnya memandang Muslim sebagai teror dan ancaman nilai-nilai Inggris, pelaku pelecehan seksual, misogini, dan sebagainya. Media yang utamanya mengekspos masalah Islam dan imigran adalah *Daily Mail* dan *Daily Express* (Merali, 2016, p. 597).

Di internet, salah satu kelompok yang jelas sedang *high profile* adalah kelompok kanan konservatif *Britain First*, yang mana memiliki pengikut di dunia lebih banyak ketimbang semua partai di Inggris. Kelompok ini mengklaim “...bukan hanya kelompok politik normal, kami adalah pejuang patriotik dan garda depan bagi rakyat yang menderita.” (Merali, 2016, pp. 599-600). Mereka juga menyatakan: “Perkembangan pesat Islam militan mendorong penindasan terhadap wanita, kebebasan berpendapat, dan serangan rasis.”

“*Britain First* telah memiliki *track record* melawan militan Islam dan pengkotbah kebencian, dan perlawanan ini akan terus berlanjut.” (Merali, 2016, p. 600).

Islamophobia di internet juga meningkat tajam pasca referendum Brexit. Sebulan setelah pemungutan suara, terdapat peningkatan 41% kekerasan kebencian. Bahkan, sehari pasca referendum, 78% cuitan mengenai referendum berisi ujaran kebencian yang mengarah ke rasisme dan Islamophobia dengan berbagai istilah, seperti “RefugeesNotWelcome”, “SendThemHome”, “Rapefugee”, “StopImmigration”, dan “f.kIslam” (Merali, 2016, p. 602).



Gambar 3.3. Cuitan Twitter yang mengandung bahasa Xenophobic di sekitar hari penentuan Brexit. Sumber: Merali, A. 2016. “Islamophobia in United Kingdom”. European Islamophobia Report, hal. 602. (Merali, 2016)

	Dampak Islamophobia terhadap Muslim di Inggris
Pendidikan	Muslim cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan kualifikasi yang buruk.
Kehidupan Sosial	Muslim kerap mengalami diskriminasi dan dikucilkan.
Pekerjaan	Muslim kebanyakan bekerja di sektor <i>low skill labor market</i> dan memiliki tingkat pengangguran terbesar.
Ekonomi	Mayoritas muslim mengalami kemiskinan.

Tabel 3.1. Tabel Dampak Islamophobia terhadap Aspek – Aspek Kehidupan Muslim di Inggris.

D. Kelompok Pro dan Kontra Islamophobia di Inggris

1. Kelompok Anti Islamophobia di Inggris

Dalam mendukung terciptanya multikulturalisme yang lebih baik di Inggris, kemudian lahirlah beberapa kelompok organisasi yang membantu terciptanya tujuan tersebut. Beberapa diantaranya adalah:

1.1. Tell MAMA (Measuring Anti-Muslim Attacks)

Tell MAMA adalah sebuah kelompok yang dibuat khusus untuk mencatat dan melaporkan insiden anti-muslim yang ada di Inggris, khususnya di wilayah ibukota, London. Organisasi ini juga memiliki tugas untuk memberikan pendekatan dan dukungan terhadap para muslim yang mengalami insiden penolakan dan diskriminasi dari berbagai pihak di Inggris (Mughal, 2013).

Organisasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Eric Pickles, pada 21 Februari 2012 (TellMAMA, 2019). Ketika mendirikan Tell MAMA, Eric tengah menjabat sebagai Sekretaris Negara untuk Departemen Komunitas dan Pemerintah Daerah. Karena memiliki latar belakang pemerintahan, organisasi ini berkembang dengan pesat, terutama dari segi pembiayaan. Selain mendapat banyak sponsor dari pihak eksternal, Tell MAMA juga mendapatkan banyak bantuan pembiayaan dari pemerintah Inggris tahun 2012 dan 2013. November 2012, Wakil Perdana Menteri, Nick Clegg, memberikan dana £ 214.000 dan naik menjadi £ 350.000 (UK Parliament, 2014). Peningkatan yang terjadi semenjak 2013, akibat tugas baru dari Tell MAMA yang diminta untuk membantu membangun masjid di seluruh negeri.

Tell MAMA telah mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak akibat peran signifikannya dalam kontrol dan pelaporan kasus anti-muslim di Inggris, terlebih setelah banyak yang membandingkan penyelesaian isu Islamophobia di Inggris paska kasus pembunuhan Charlie Hebdo di Paris 2015 silam. Paska kasus Hebdo, muncul begitu banyak ancaman terhadap masjid-masjid di London dan Birmingham (Evening Standard, 2015). Tell MAMA berhasil masuk dalam dominasi *Charity of*

the Year Award oleh British Muslim Awards, sebanyak dua kali, pada 2013 dan 2016 (Asian Image, 2016).

1.2. J-Voice

J-Voice, merupakan sebuah komunitas sosialis dan Yahudi progresif, telah mengutuk apa yang disebutnya sebagai 'peningkatan kebencian terhadap Muslim' dan menyerukan umat Muslim dan Yahudi di Inggris untuk tetap bersatu melawan sayap kanan (J-VOICE, 2019).

Sejak didirikan pada 2012, J-Voice setidaknya telah membantu 1.432 kasus diskriminasi di Inggris, 219 diantaranya adalah bantuan terhadap serangan-serangan kelompok radikal, terhadap masjid-masjid yang ada, termasuk tiga pengeboman yang terjadi pada 2013-2014 di Inggris (Whitehead, 2014). Pada tahun pertama berdirinya, J-Voice telah menyelesaikan 632 insiden diskriminasi dan Islamophobia di Inggris. Berdasarkan data BBC, 70% korban diskriminasi dilakukan kebanyakan terhadap wanita berhijab, dengan mayoritas tersangka adalah pria kulit putih, usia 21-50 tahun. Berkat berbagai perannya yang begitu besar bagi penyelesaian isu Islamophobia.

2. Kelompok Islamophobic di Inggris

Meskipun pada kenyataannya Inggris telah menerapkan berbagai prinsip multikulturalisme dalam penyelenggaraan negaranya, namun penduduk muslim di Inggris masih mendapatkan berbagai penantangan dari beberapa pihak, antara lain:

2.1. English Defense League

The English Defense League (EDL) adalah salah satu kelompok fasis di Inggris yang memperkenalkan diri sebagai kelompok anti-Islam. Organisasi ini terkenal dengan logo salib merah abad pertengahan, dengan menggunakan slogan ‘Pembela Iman, Pembela Inggris’ (EDL, 2016). Demi meningkatkan semangat juang, dalam setiap kiprahnya, mereka mengenakan kaos dengan gambar seorang ksatria Kristen atau tentara Perang Salib yang sedang berdoa dengan pedang terhunus. Banyak simpatisan EDL saat demonstrasi berpenampilan mirip seperti dikenakan oleh kaum ekstrimis sayap kanan. Hampir semuanya anak muda, pria berkulit putih. Beberapa di antara mereka bahkan mencukur rambutnya hingga plontos layaknya dilakukan oleh kelompok *skinhead* dan memakai simbol-simbol nasionalis (Tempo, 2013).

EDL merupakan gerakan protes yang menentang apa saja yang dianggap sebagai Islamisasi, hukum Syariah dan ekstrimisme Islam di Inggris. EDL telah digambarkan sebagai Islamophobia. EDL berasal dari kelompok yang dikenal sebagai

United Peoples of Luton (UPL). The UPL dibentuk sebagai tanggapan terhadap demonstrasi yang diselenggarakan oleh organisasi ekstremis Islam, Al-Muhajirun (Peter & Ortega, 2014). Kelompok mereka terdiri dari Kristen garis keras, Yahudi, Gay, Sikh, bahkan Hooligans. Lebih lucunya lagi, terdapat kelompok neo-Nazi yang bergabung padahal ideologi mereka bertentangan dengan Yahudi, jika mengingat peristiwa Holocaust.

2.2. Afro-Caribbean

Afro Caribbean, merupakan penduduk Inggris berlatar belakang India Barat (Jamaika, Trinidad Tobago dan sebagainya) dan yang nenek moyangnya orang pribumi Afrika. Imigrasi mereka ke Inggris dari Afrika meningkat pada tahun 1990-an. Istilah tersebut kadang-kadang digunakan untuk menyertakan warga Inggris yang semata-mata berasal dari Afrika, atau sebagai istilah untuk mendefinisikan semua warga Inggris berkulit hitam (Minority Rights Group International, 2019).

Pada awalnya, kelompok Afro-Caribbean sebenarnya hanya berupaya menyerang pemerintah serta polisi setempat akibat pembunuhan temannya, Mark Duggan. Akan tetapi mereka lebih banyak menyerang kelompok Muslim Asia

Selatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kelompok Asia Selatan lebih sukses secara ekonomi ketimbang kelompok mereka. Selain itu, kelompok Asia Selatan sebagai minoritas lebih mudah jadi amukan mereka (Aidid, 2011). Hal ini serupa dengan kekerasan demonstran terhadap kalangan minoritas di Indonesia, padahal aspirasi mereka ditujukan kepada pemerintah.